

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa peran kunci yang diperoleh dari keterlibatan BKSAP di IPU, APA, dan PUIC, penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen Indonesia telah bertransformasi menjadi kekuatan normatif yang mampu membentuk agenda, membangun solidaritas lintas kawasan, dan menekan komunitas internasional agar tidak mengabaikan tragedi kemanusiaan di Palestina. Transformasi ini menandai pergeseran peran parlemen dari sekadar aktor pendukung menjadi bagian penting dalam strategi politik luar negeri Indonesia.

Dalam **Inter-Parliamentary Union (IPU)**, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa BKSAP berhasil memposisikan isu Palestina sebagai agenda global meskipun menghadapi resistensi kuat dari negara-negara Barat. Upaya pengajuan *emergency item* pada IPU ke-147 dan IPU ke-148, meskipun belum memenuhi ambang batas formal, tetap menghasilkan dukungan lebih dari separuh anggota dan memaksa parlemen dunia mengambil posisi terbuka. Strategi Indonesia melalui pembentukan koalisi Asia–Afrika–Amerika Latin, lobi intensif, serta kompromi redaksional membuktikan kapasitas BKSAP dalam memimpin proses negosiasi multilateral yang kompleks. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Eksekutif IPU kawasan Asia-Pasifik semakin memperkuat posisi strategis Indonesia untuk terus mengangkat isu Palestina di tingkat global.

Pada level kawasan Asia melalui **Asian Parliamentary Assembly (APA)**, BKSAP mencatatkan terobosan institusional dengan menginisiasi pembentukan *APA Committee on Palestine*. Komite ini menggeser pendekatan APA dari resolusi simbolik menjadi mekanisme permanen yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui forum di Baghdad, Antalya, Teheran, dan Baku, Indonesia berhasil mengonsolidasikan solidaritas parlemen Asia serta memperkuat

rekomendasi kolektif yang menekankan investigasi independen, akses bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum humaniter internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen Indonesia tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam membentuk arsitektur kelembagaan baru untuk mengawal isu Palestina di kawasan.

Sementara itu peran dalam **Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)**, Indonesia tampil sebagai arsitek penggerak kebijakan kolektif dunia Islam. Pada Konferensi PUIC ke-18 di Abidjan, sebagian besar gagasan Indonesia—mulai dari reformasi DK PBB, desakan putusan final ICJ, perluasan gerakan BDS, hingga pembentukan *Global Parliamentary Humanitarian Campaign for Gaza*—diadopsi dalam komunike akhir. Peran ini menegaskan bahwa diplomasi parlemen Indonesia mampu melampaui retorika solidaritas dan masuk ke ranah aksi kolektif.

Dari peran di ketiga forum tersebut, diplomasi parlemen Indonesia melalui BKSAP pada periode 2023–2024 terbukti bahwa parlemen bukan sekadar pelengkap kebijakan luar negeri, melainkan aktor strategis yang mampu menciptakan ruang tekanan politik, membentuk opini internasional, serta memperluas solidaritas global bagi Palestina. Ketika diplomasi eksekutif terhambat oleh kepentingan geopolitik dan veto kekuasaan besar, jalur parlemen justru tampil lebih luwes, berani, dan responsif terhadap krisis kemanusiaan. ke depan, konsistensi dan penguatan kapasitas BKSAP menjadi kunci agar peran ini tidak berhenti sebagai momentum temporer, tetapi berkembang menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang terinstitusionalisasi. Penguatan jejaring lintas kawasan, peningkatan kualitas lobi, serta pemanfaatan posisi strategis Indonesia di berbagai forum parlemen dunia harus terus dioptimalkan. Dengan demikian, diplomasi parlemen Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai suara moral, tetapi juga sebagai kekuatan normatif yang mampu mendorong perubahan nyata dalam tatanan internasional yang lebih adil dan berperikemanusiaan

6.2 SARAN PRAKTIS DAN AKADEMIS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang penulis ingin kemukakan, yaitu:

- a. **Saran Praktis**
Secara praktis, BKSAP DPR RI perlu memperkuat efektivitas diplomasi parlemen dengan membangun koordinasi yang lebih terstruktur antara GKSB, Kementerian Luar Negeri, lembaga kemanusiaan, dan mitra internasional, serta memformalkan komunikasi rutin dengan PLO/PNC untuk memastikan informasi cepat dan akurat. BKSAP juga dapat mengembangkan parliamentary early warning system guna mendeteksi potensi eskalasi kemanusiaan di Gaza sehingga respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat. Di forum multilateral, peningkatan kapasitas diplomasi teknis terutama dalam penyusunan resolusi, lobi antar-kawasan, dan strategi komunikasi politik menjadi penting agar Indonesia mampu mengatasi tekanan negara besar dan menjaga isu Palestina tetap menjadi agenda prioritas, termasuk dengan membangun koalisi sejak pra-sidang. Pada tingkat bilateral, pembentukan parliamentary humanitarian task force dengan negara-negara sahabat seperti Turki, Afrika Selatan, Malaysia, dan Qatar dapat memperkuat dampak bantuan langsung bagi Gaza sekaligus meningkatkan posisi kepemimpinan Indonesia di jejaring solidaritas dunia Islam dan Global South.
- b. **Saran Akademis**
Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memperdalam kajian diplomasi parlemen, khususnya peran BKSAP dalam advokasi kemanusiaan dan konflik internasional di negara berkembang. Penelitian lanjutan perlu membandingkan efektivitas diplomasi parlemen Indonesia dengan negara-negara Global South serta memasukkan pendekatan teoritis alternatif seperti konstruktivisme, diplomasi moral, dan analisis identitas negara untuk memperkaya pemahaman atas konsistensi posisi Indonesia terhadap Palestina. Studi

100

berikutnya juga dapat mengintegrasikan perspektif *multi-track diplomacy* guna menilai kontribusi aktor non-negara mulai dari akademisi, organisasi kemanusiaan, hingga jaringan masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem diplomasi parlemen Indonesia. Pendekatan yang lebih luas ini akan membantu menggambarkan dinamika diplomasi Indonesia secara lebih holistik dan mengisi kekosongan teoritis dalam kajian diplomasi parlemen di Asia Tenggara.

Dengan demikian, baik secara akademis maupun praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian diplomasi parlemen dan sekaligus memperkuat kapasitas nyata BKSAP dalam menjalankan mandat politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan anti-penjajahan. Penelitian lanjutan dan upaya implementasi praktis dari saran ini akan membantu memastikan bahwa peran diplomasi parlemen Indonesia terhadap Palestina tidak berhenti pada level normatif, tetapi terus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam memperjuangkan dan membantu hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional.